

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR



TAHUN 2016



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2016 dapat tersusun berkat kerjasama yang baik dari Tim Penyusun LAKIP KKP Kelas I Makassar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program – program kegiatan tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2016 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan program di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun-tahun berikutnya.

Makassar, Januari 2017

Kepala Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Makassar,

dr. Darmawali Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2016 dimana menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dalam prakteknya terdapat 11 (sebelas) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rencana aksi kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar. Kesebelas indikator tersebut adalah : 1) Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon; 2) Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan; 3) Persentase Pelabuhan/Bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu; 4) Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung; 5) Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular; 6) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan; 7) Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan; 8) Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; 9) Persentase Pelabuhan/ Bandara sehat; 10) Hasil Penilaian SAKIP adalah AA; 11) Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarannya.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan rencana lima tahunan. Dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat 16 indikator KKP Kelas I Makassar untuk mencapai sasaran program yang merupakan penjabaran kegiatan dari Indikator Utama Ditjen P2P. Adapun pencapaian hasilnya dapat dilihat lebih jelas pada bab III Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang pencapaiannya belum memenuhi target yaitu indikator Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu dengan pencapaian kinerja 50%. Namun ada pula yang telah melebihi dari target yang diharapkan diantaranya yaitu persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar pencapaian target kinerja sebesar 177%. Fungsi dari penilaian indikator-indikator tersebut adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil, serta saran untuk perbaikan pencapaian pada tahun berikutnya. Pada Lakip 2016 ini terdapat penjelasan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang tidak dijelaskan pada Lakip tahun sebelumnya. Analisis penggunaan sumber daya dilihat dari sumber daya manusia maupun sumber dana yang digunakan dalam pencapaian target kegiatan dibandingkan dengan pencapaian target tahun sebelumnya dengan penggunaan sumber daya manusia atau sumber dana yang sama.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar, Tabel dan Grafik	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	12
A. Perencanaan Kinerja.....	12
1. Rencana Aksi Kegiatan	12
2. Rencana Kinerja Tahunan.....	20
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	30
C. Sumber daya	62
BAB IV Penutup	67
Pustaka Acuan	
Penyusun	

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2016	5
------------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 – 2019 KKP Kelas I Makassar	16
Tabel II.2	Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2016	21
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2016.....	24
Tabel III.1	Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi	29
Tabel III.2	Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2016	65
Tabel III.3	Laporan BMN Tahun Anggaran 2016	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik	III.1	Grafik persentase penumpang yang diawasi dan jumlah penumpang yang terdeteksi demam >38oC melalui thermal scanner di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2016...	31
Grafik	III.2	Grafik persentase kasus KLB ditangani <24 jam di Wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2016	34
Grafik	III.3	Grafik Presentase kedatangan kapal dari luar negeri yang mendapatkan Free Pratique di KKP Kelas I Makassar Tahun 2016	37
Grafik	III.4	Grafik persentase HPAGD benar di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2016	39
Grafik	III.5	Grafik Capaian Jumlah Pelabuhan/Bandara yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Penyakit Menular Langsung Pada Tahun 2015-2016.....	45
Grafik	III.6	Capaian Jumlah Pelabuhan/Bandara Yang Melaksanakan Kegiatan Skrining Penyakit Tidak Menular Pada Tahun 2015 – 2016	47
Grafik	III.7	Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar Tahun 2014 s.d 2015.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan perencanaan strategis dan manajemen berbasis kinerja sebagai perwujudan profesionalisme Instansi Pemerintah, sehingga diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), sesuai Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP-PL) sesuai Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2011 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

LAKIP KKP Kelas I Makassar Tahun 2016 menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan selama tahun 2016 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala KKP Kelas I Makassar kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.

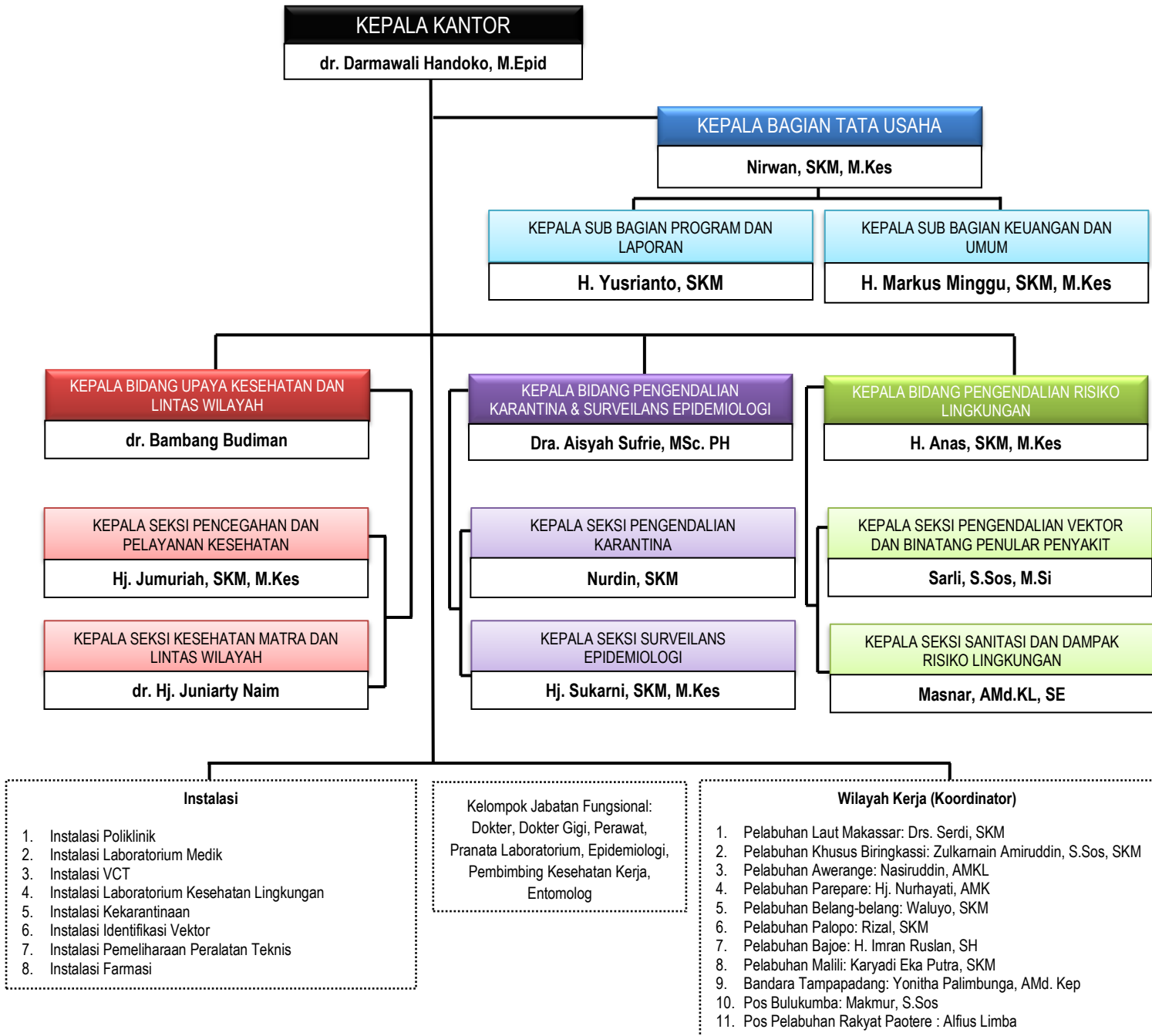
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan , dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Karantina
 - b. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seksi Yaitu :
 - b. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
 - c. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
5. Wilayah Kerja
6. Instalasi
7. Kelompok jabatan fungsional

Selengkapnya tentang struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada halaman selanjutnya.



Gambar I.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2016

Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah :

1. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program
 - 2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
 - 3) Menyebarluaskan informasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
 - 1) Melaksanakan Urusan Akuntansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana
 - 2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha
 - 3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian
 - 4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - 5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
 - a. Seksi Pengendalian Karantina
 - 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor
 - 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat transportasi lainnya
 - 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang sakit/jenazah
 - 6) Kajian di bidang kekarantinaan
 - 7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan
 - 8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional.
- 5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida.
- 4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

- 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

- a. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- b. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan minuman.
- c. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat.
- d. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/bangunan.
- e. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara, air dan tanah.
- f. Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- g. Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan
- h. Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi lingkungan
- i. Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan
- j. Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan.

- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat transportasi lainnya.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik.
- 4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja
- 5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja
- 6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja
- 7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja
- 8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja

b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV)
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji
- 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk
- 6) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
- 7) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas
- 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik.
- 9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra
- 10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra
- 11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra.

5. Instalasi

Instalasi dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar. Instalasi yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah :

- a. Instalasi Poliklinik
- b. Instalasi Laboratorium Medik
- c. Instalasi VCT
- d. Instalasi Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- e. Instalasi Identifikasi Vektor
- f. Instalasi Kekarantinaan
- g. Instalasi Pemeliharaan Peralatan Teknis KKP
- h. Instalasi Farmasi

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terdiri dari :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Perencanaan Kinerja
 1. Rencana Aksi Kegiatan
 2. Rencana Kinerja Tahunan
- B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Pencapaian Kinerja
- C. Sumber daya

BAB IV Penutup

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2016 serta cara mencapai tujuan tersebut. Bab ini juga menjelaskan Perjanjian Kinerja (penetapan kinerja) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, aspek keuangan, aspek sumber daya, kebijakan dan manajemen kesehatan serta strategis pemecahan masalah.

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas 2 (dua) yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) PP dan PL tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.

Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2015–2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen PP dan PL dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan serta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Pada tanggal 7 s.d 9 November 2016 di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung

dilakukan pertemuan penyusunan draft Revisi RAP Ditjen P2P. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu UPT dari Ditjen P2P yang mendukung pelaksanaan tujuan/program yang ditetapkan oleh Ditjen P2P, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang telah disusun sebelumnya juga mengalami perubahan.

1) VISI DAN MISI

Program P2P mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.

KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Makassar.

Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program PP dan PL mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

- 1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. TUJUAN

1) Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

- a) Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;
- b) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit menular dan penyakit menular potensial wabah;
- c) Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;
- d) Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;
- e) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2015-2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen P2P. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel II.1 yang disajikan pada halaman berikut :

**Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

NO.	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SATUAN					ALOKASI					TOTAL ALOKASI		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar									18,048,304,000	29,662,226,000	38,545,978,900	40,352,527,845	42,370,154,237	168,864,190,982	
	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber	I	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	100	100	100	100	100							
			II	Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	100	100	100	100	100							
		III	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	100	100	100	100	100								
		IV	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini	100	100	100	100	100								
		V	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50	50	60	70	80								
		Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	VI	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	100	100	100	100	100							
			VII	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	100	100	100	100	100							
			VIII	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	50	50	60	70	70							
			IX	Persentase Pelabuhan/ Bandara sehat	40	40	50	60	70							
		Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	X	Hasil Penilaian SAKIP adalah AA	AA	AA	AA	AA	AA							
			XI	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarannya	50	50	60	80	90							

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019

**Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

NO	KEGIATAN	SASARAN	IKK	INDIKATOR SATKER	TARGET SATUAN					ALOKASI					TOTAL ALOKASI	PJ			
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar										18,048,304,000	29,662,226,000	38,430,978,900	40,352,527,845	42,370,154,237	168,864,190,982				
1.	Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra									4,699,808,000	6,911,482,000	7,504,040,000	7,879,242,000	8,273,204,100	35,267,776,100				
	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra		I	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	1	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100	100	100	100	100						Bidang PKSE		
2					Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100	100	100	100	100								Bidang PKSE	
			II	Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	3	Presentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100	100	100	100	100								Bidang PKSE
4					Presentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	50	55	60	65	70									Bidang PKSE
2.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang									444,375,000	769,667,000	1,381,816,000	1,450,906,800	1,523,452,140	5,570,216,940				
	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit		III.	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	5	Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100	100	100	100	100						Bidang PRL		

		bersumber binatang		6	Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter		70	80	90	100										Bidang PRL		
3.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung										243,695,000	810,640,000	853,346,000	896,013,300	940,813,965	3,744,508,265						
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	IV	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	7	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	30	70	80	90											Bidang UKLW	
4.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular										361,175,000	404,905,000	510,640,000	536,172,000	562,980,600	2,375,872,600						
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	V	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	8	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50	60	70	80												Bidang UKLW
5.	Penyehatan Lingkungan										625,039,000											
		Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	VI	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	9	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70	70	80	80	85											Bidang PRL
					10	Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium		80	90	95	95											Bidang PRL
			VII	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	11	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	75	80	90	90	95											Bidang PRL

			VIII	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	12	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50	50	50	70	70							Bidang PRL	
			IX	Persentase Pelabuhan/Bandara sehat	13	Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat	40	40	50	60	70								Bidang PRL
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan											11,674,212,000	20,765,532,000	28,181,136,900	29,590,193,745	31,069,703,432.25	121,280,778,077		
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	X	Hasil Penilaian SAKIP adalah AA	14	Hasil Penilaian SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA							Bagian TU	
			XI	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya	15	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kementerian	30	45	45	55	64							Bagian TU	
					16	Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus		55	64	73	82							Bagian TU	

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019

2. Rencana Kinerja Tahunan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2016, telah disusun

Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2016

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	I Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons	100
		Persentase ABK/crew dan penumpang 1 alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100
		2 Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100
		II Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	100
		Persentase kapal dari luar negeri langsung 1 yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100
		2 Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	55
2	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	III. Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	100
		Persentase wilker yang melakukan 1 pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100
		Persentase wilker yang melakukan 2 pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter	70
3	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	IV Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	30

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	V Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50
5	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	VI Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	100
		1 Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70
		2 Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium	80
		VII Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	80
		VIII Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	50
		1 Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50
		IX Persentase Pelabuhan/Bandara sehat	40
		1 Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat	40
6	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	X Hasil Penilaian SAKIP	AA
		XI Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarannya	50
		1 Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes	45
		2 Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus	55

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai atasan langsungnya untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel II.3 pada halaman berikut :

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2016

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100
2	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100
3	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100
4	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	55
5	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100
6	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter	70
7	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	30
8	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50
9	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70
10	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium	80

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
11	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	80
12	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50
13	Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat	40
14	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Hasil Penilaian SAKIP	AA
15	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes	45
16	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus	55

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja KKP Kelas I Makassar khususnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas I Makassar dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra;

2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang;
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung;
4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular;
5. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
6. Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2016, ada 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program yang terdapat pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons
2. Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan
3. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu
4. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung
5. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular
6. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
7. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
8. Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
9. Persentase Pelabuhan/Bandara sehat
10. Hasil Penilaian SAKIP adalah AA
11. Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

Kesebelas Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan indikator turunan dari direktorat – direktorat yang terdapat pada Ditjen P2P, Besaran target dan realisasi indikator kinerja utama secara rinci di sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SATKER	TARGET	DENOMINATOR		REALISASI	%		PJ	
			JUMLAH	SAT		Capaian	Kinerja		
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan mata	I	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons							
	1	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100	85.493	Orang	85.493	100	100	PKSE
	2	Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100	2	Kasus	2	100	100	PKSE
	II	Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan							
	1	Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100	366	kapal	366	100	100	PKSE
	2	Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	55	533	HPAGD	520	98	177	PKSE
Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	III.	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu							
	1	Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100	10	Wilker	5	50	50	PRL
	2	Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter	70	10	Wilker	7	70	100	PRL
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	IV	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	30	12	Pel/Band	6	50	167	UKLW
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	V	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50	12	Pel/Band	7	58	117	UKLW
Meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	VI	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan							
	1	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70	377	Kali Pemr	347	92	131	PRL
	2	Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium	80	297	Sampel	260	88	109	PRL
	VII	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	80	45	TPM	45	100	125	PRL
	VIII	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan							
	1	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50	425	Kegiatan	193	45	91	PRL
Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	IX	Persentase Pelabuhan/Bandara sehat							
	1	Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat	40	8	Lokasi	4	50	125	PRL
	X	Hasil Penilaian SAKIP	AA	AA	Nilai	AA	100	100	TU
	XI	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya							
	1	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik ke	45	11	Wilker	5	45	100	TU
2	Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus	55	11	Wilker	6	55	100	TU	

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar akan diuraikan masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

Target persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu :

a. **Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan**

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal dari luar negeri yang diamati

(2) Definisi Operasional

ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal dari luar negeri yang diamati sesuai SOP dibandingkan dengan ABK/crew dan penumpang yang datang dari luar negeri

(3) Rumus

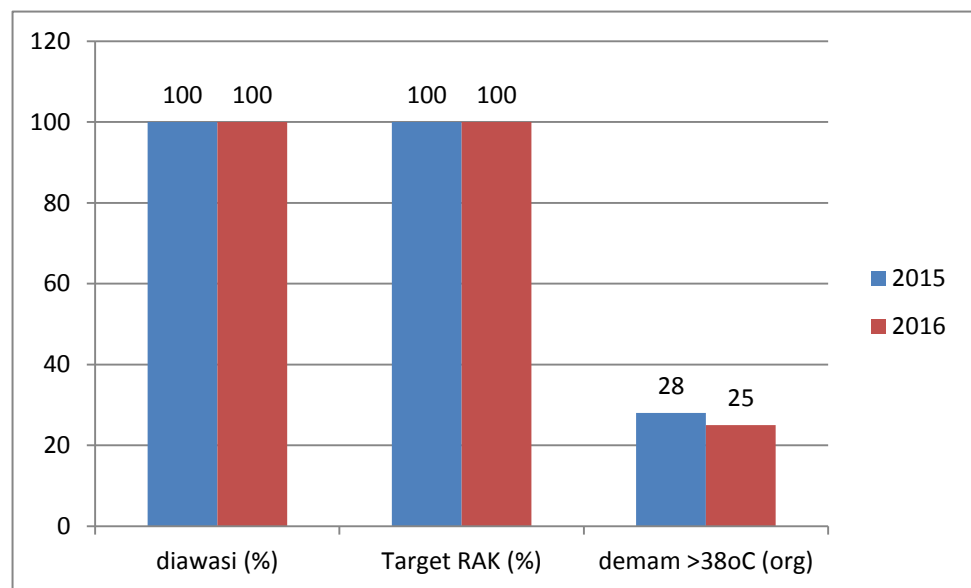
$$\frac{\text{Jumlah ABK, Crew, Penumpang diamati}}{\text{Jumlah seluruh ABK, Crew, Penumpang dari luar negeri}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{85.493}{85.493} \times 100 = 100\%$$

Jumlah ABK/Crew, penumpang alat angkut yang berasal dari luar negeri dan tidak ditemukan penyakit PHEIC/KKMMMD sebanyak

(100%) dari total 85.493 orang yang diawasi; pada tahun ini dua orang dinyatakan suspek Mers-Cov dan 25 orang terdeteksi demam melalui termal scanner dan ditindaklanjuti sesuai standar kekarantinaan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015) 58.623 orang yang diawasi (100%) dan terdapat 28 orang yang terdeteksi demam melalui thermal scanner dan ditindaklanjuti sesuai standar kekarantinaan.



Grafik III.1 Grafik persentase penumpang yang diawasi dan jumlah penumpang yang terdeteksi demam >38oC melalui thermal scanner di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2016

- c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan
- (1) Jumlah penerbangan internasional dan pelaku perjalanan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin semakin padat sehingga perlu ditambahkan jumlah petugas yang melakukan pengawasan.
 - (2) Sensivitas alat thermal scanner dan thermometer infra red terkadang tidak optimal.
 - (3) Usul pemecahan masalah yaitu dengan melakukan kalibrasi secara berkala terhadap alat thermal scanner dan thermometer infrared.

- d) Analisis Efisiensi Sumber daya
 - (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
 - (2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal
 - (3) Dalam kegiatan ini tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan kecuali pada hari libur.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan PHEIC 24 Jam sehari dan 7 hari perminggu pada RKAKL 2016 adalah sebesar Rp. 438.750.000,- (*Empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 370.650.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) atau 84%.

b. **Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam**

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kasus yang ditangani < 24 jam dalam rangka penanggulangan KLB/PHEIC

(2) Definisi Operasional

Kegiatan/tindakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan kurang dari 24 jam sejak diketahui/diterimanya informasi terjadinya kejadian luar biasa yang bertujuan untuk meminimalisir meluasnya kejadian yang dilaksanakan oleh tim secara terpadu sesuai SOP.

(3) Rumus

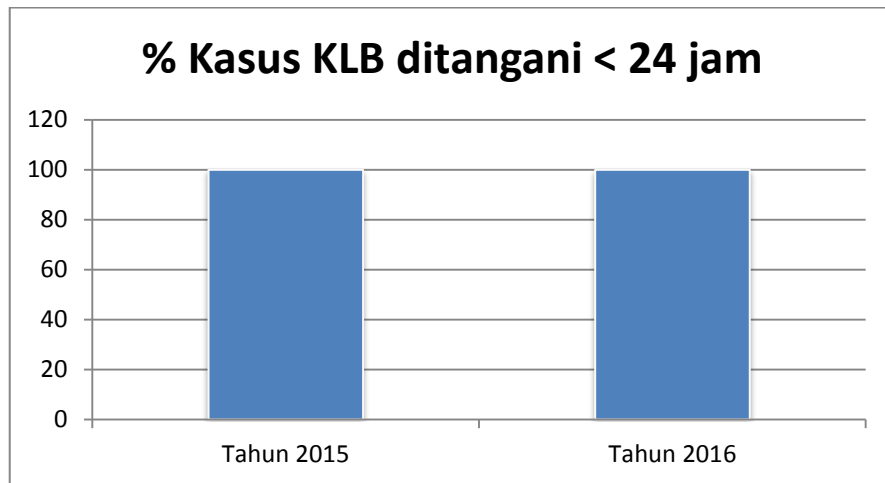
$$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani} < 24 \text{ jam}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Pada tahun 2016 ada 2 kasus KLB yang tertangani < 24 jam, untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015 juga terdapat kasus yang ditangani < 24 Jam, yaitu :

- (1) Jemaah haji asal Makassar mengalami gejala demam 38⁰ C, batuk berlendir, sesak, ronchi +, DD pneumonia, dengan hasil pemeriksaan dokter yang diduga MERS CoV (kasus probable). Setelah menerima laporan tersebut, TIM KKP langsung merujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah dikontak sebelumnya. TIM KKP melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Litbangkes dinyatakan bukan kasus MERS CoV.
- (2) Jamaah umroh asal Bulukumba dengan kondisi demam dan sesak, dirawat RS. Awal Bros koordinasi dengan kerjasama dengan TGC Provinsi Sulsel, hasil pemeriksaan laboratorium nasional negative Mers.Cov



Grafik III.2 Grafik persentase kasus KLB ditangani <24 jam di Wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2016

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

(1) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

(a) Perlunya dilaksanakan simulasi oleh petugas KKP Kelas I Makassar secara berkala untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam cegah tangkal penyakit.

(b) Kerjasama Tim TGC Prov Sulsel sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga setiap kasus suspek dapat segera ditangani secara terintegrasi

(c) Perlunya sistem SKD KLB yang terkoneksi antara daerah/wilayah dengan pintu masuk (pelabuhan dan bandara)

(d) Perlu penguatan *port to port* dalam pengiriman spesimen.

(2) Masalah yang dihadapi

SKD KLB belum terbangun antara pintu masuk dengan wilayah, notifikasi di pintu masuk belum tercatat di SKDR.

(3) Usul Pemecahan Masalah

Agar dapat dibuatkan menu khusus pada www.skdr.surveilans.org bagi laporan notifikasi KKP di pintu masuk.

d) Analisis Efisiensi Sumber daya

- (1) Sumber daya manusia yang digunakan adalah tenaga epidemiolog, dokter, perawat, dan sanitarian dari KKP yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam penyelidikan epidemiologi.
- (2) Sumber dana yang digunakan menggunakan dana DIPA KKP Makassar *at cost* berdasarkan kebutuhan di lapangan.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit & kedaruratan kesehatan sebesar Rp. 3.025.000,- (*Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) atau 99%.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Target persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase kapal dari luar negeri yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kapal yang datang dari luar negeri yang mendapatkan free pratique

(2) Definisi Operasional

(a) Pemeriksaan Kapal yang berasal dari luar negeri yang diperiksa oleh petugas sesuai SOP dan diterbitkan *Free Pratique*

(b) Faktor risiko penularan penyakit diukur dengan melihat kesesuaian isi *Maritime Declaration of Health* (MDH) dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi syarat sanitasi kapal.

(3) Rumus

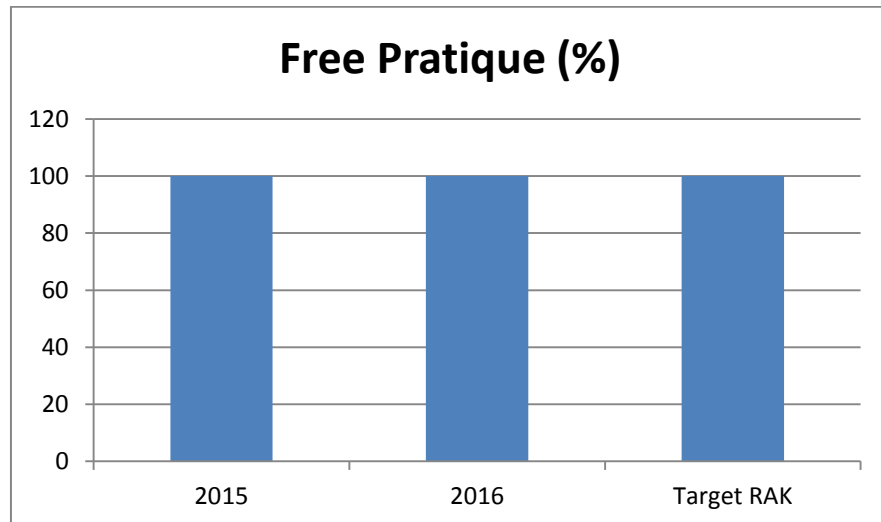
$$\frac{\text{Jumlah kapal dari luar negeri yang mendapatkan Free Pratique}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kapal dari Luar negeri}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{366}{366} \times 100 = 100\%$$

Persentase Kapal dari Luar Negeri baik dari Negara terjangkit maupun dari Negara tidak terjangkit yang mendapatkan *Free Pratique* sebanyak 366 kapal, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit tahun 2016 sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya 2015 Jumlah kapal dari luar negeri sebanyak 250 kapal baik dari negara

terjangkit atau tidak terjangkit. Semua kapal (100%) diperiksa sesuai SOP dan diterbitkan *free pratique*.



Grafik III.3 Grafik Presentase kedatangan kapal dari luar negeri yang mendapatkan Free Pratique di KKP Kelas I Makassar Tahun 2016

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Pemeriksaan faktor risiko terhadap kapal yang berasal dari luar negeri telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur kekarantinaan yang ditunjang dengan Kegiatan Pengawasan PHEIC di pintu masuk Negara selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

d) Analisis Efisiensi Sumber daya

(1) Sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dalam penerbitan free pratique terdiri dari petugas Karantina, Dokter / perawat, dan petugas sanitasi. Pada beberapa wilker jumlah petugas masih belum memadai, sehingga perlu ditambah atau pemerataan jumlah petugas.

(2) Sumber dana menggunakan dana Dipa KKP Makassar, dana yang digunakan tidak terlalu besar karena terbentur pada aturan pencairan dana untuk boarding.

2) Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016 anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 21%, rendahnya pencapaian ini karena beberapa wilker tidak menyerap anggaran ini.

b. Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase HPAGD yang dilaporkan selama penerbangan dengan informasi yang benar / sesuai dengan keadaan selama penerbangan.

(2) Definisi Operasional

Health Part of The Aircraft General Declaration (HPAGD) adalah dokumen deklarasi kesehatan penerbangan yang berisi tentang informasi kesehatan selama penerbangan harus ditandatangani oleh pilot atau kru penerbangan, dan laporan sesuai dengan kondisi selama penerbangan.

(3) Rumus

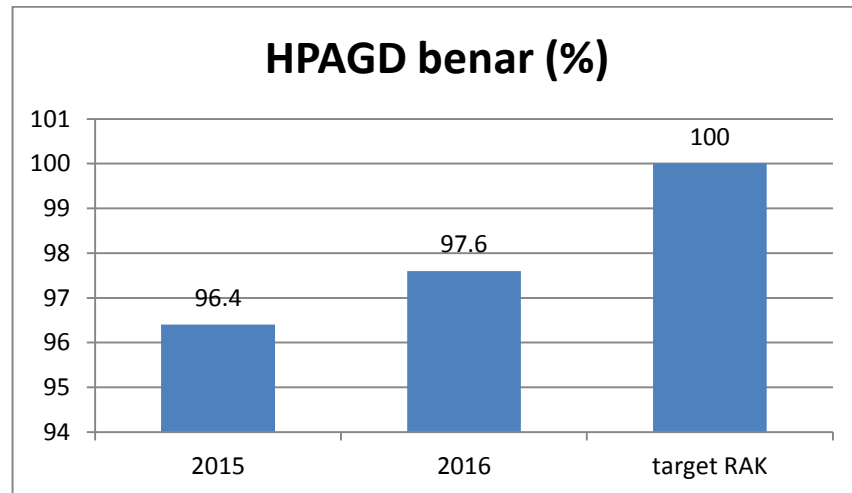
$$\frac{\text{Jumlah HPAGD dengan Informasi yang benar}}{\text{Jumlah seluruh HPAGD yang diterima}} \times 100 \%$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{520}{533} \times 100 \% = 97,6\%$$

Pada tahun 2016 maskapai yang telah memberikan dokumen HPAGD dengan informasi yang benar kepada petugas saat pesawat tiba di bandara sebanyak 520 HPAGD (97,6 %) dari total 533 HPAGD yang diterima. Capaian pada tahun 2015 sebanyak 459

HPAGD (96,4 %) dari total 476 HPAGD yang diterima. Terjadi peningkatan jumlah HPAGD yang benar dari tahun sebelumnya.



Grafik III.4 Grafik persentase HPAGD benar di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2016

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

- (1) Masih ada maskapai yang mengisi dokumen tidak sesuai dengan kondisi selama perjalanan.
- (2) Upaya pemecahan masalah yaitu perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh maskapai yang melaksanakan penerbangan internasional agar melaporkan setiap kejadian selama penerbangan yang dituangkan di HPAGD.

d) Analisis Efisiensi Sumber daya

- (1) Sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan petugas bidang karantina dan surveilans epidemiologi. Jumlah petugas bidang PKSE masih perlu ditambah untuk mengantisipasi banyaknya penambahan penerbangan internasional.

(2) Sumber dana

Pada kegiatan ini tidak menggunakan dana karena dikerjakan oleh petugas piket.

2) Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

3. INDIKATOR KETIGA

Persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu

Target persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

a. Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker dengan pelaksanaan tindakan pengendalian vektor terpadu

(2) Definisi Operasional

Tindakan pengendalian vektor terpadu (PVT) berupa pelaksanaan minimal 2 (dua) metode pengendalian yang diterapkan dalam satu wilker di wilayah perimeter

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah wilker yang melakukan PVT}}{\text{Jumlah seluruh wilker}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{5}{10} \times 100 = 50\%$$

Pada tahun 2016 jumlah wilayah kerja yang melaksanakan minimal 2 (dua) metode pengendalian vektor terpadu sebanyak 5 (lima) wilayah kerja (50%) dari 10 wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan gabungan dari kegiatan layanan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik di

Pelabuhan/Bandara dan PLBD. Kegiatan terpadu yang telah direncanakan, yaitu fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan larvasidasi. Pelaksanaan fogging didasarkan pada hasil survey jentik dengan *Container Index* (CI) > 0%. Survey jentik dilakukan oleh petugas jumentik / kader di bawah supervisi petugas PRL. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah jumlah peralatan fogging dan SDM yang belum tersedia di beberapa wilker. Kurangnya pengendalian dari penanggungjawab program merupakan salah satu sebab tidak tercapainya target.

Usulan pemecahan masalah adalah diupayakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan fogging serta penempatan SDM yang kompeten di wilker yang membutuhkan. Meningkatkan pengendalian dengan memberikan *feedback* terhadap pelaksanaan kegiatan di wilker.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

(1) Kebijakan pemerintah tentang adanya penghematan anggaran

(2) Pada beberapa wilker pelaksanaan pengendalian vektor dilaksanakan bersama dengan petugas Puskesmas wilayah buffer.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengendalian vektor terpadu (fogging, PSN, larvasidasi) sebanyak Rp. 104.910.000,- kemudian diefisiensi menjadi Rp. 56.205.000,- (*Lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 52.220.300,- (*Lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*) atau 92,91%

b. Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker yang melaksanakan tindakan pengendalian binatang penular penyakit (BPP)

(2) Definisi Operasional

Tindakan pengendalian binatang penular penyakit didasarkan pada pelaksanaan kegiatan pemasangan perangkap tikus di wilayah kerja

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah wilker yang melaksanakan tindakan pengendalian BPP}}{\text{Jumlah seluruh wilker}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$$

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh wilayah kerja, pada tahun 2016 keberhasilan indikator kegiatan mencapai 70%. Kegiatan ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 70%, capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Pemasangan perangkap dilakukan dengan menggunakan *life-trap* selama 5 (lima) hari berturut – turut dalam setiap bulannya. Selama pelaksanaan pemasangan perangkap masih ditemukan beberapa masalah termasuk banyaknya perangkap yang hilang serta rusak di lapangan/lokasi pemasangan. Dari hasil tikus yang tertangkap kemudian dilakukan identifikasi tikus dan pinjal, tetapi belum dilakukan konfirmasi bakteri / virus yang terdapat pada tikus tersebut.

Usulan pemecahan masalah

(1) Diharapkan pengadaan perangkat dengan metode yang berbeda yang lebih efektif dan efisien.

(2) Direncanakan pada tahun 2017 akan dilakukan konfirmasi bakteri / virus yang terdapat pada tikus ke laboratorium rujukan.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2015 realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 32.020.800,- (Tiga puluh dua juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) sedangkan pada tahun 2016 dengan volume kegiatan yang relative bertambah, realisasi anggaran yang digunakan lebih efisien yakni sebesar Rp. 30.975.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hal ini karena adanya kerjasama dengan masyarakat setempat ataupun kader dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengendalian binatang penular penyakit sebanyak Rp. 30.975.000,- (*Tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 30.940.500,- (*Tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) atau 99,89%

4. INDIKATOR KEEMPAT

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

Target persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung pada tahun 2016 adalah sebesar 30%.

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase pelabuhan/ bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung (PML).

(2) Definisi Operasional

Wilayah Kerja pelabuhan/bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit HIV/AIDS dan atau TB paru dengan menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) kepada penyedia dan pengguna jasa pelabuhan/bandara.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan deteksi dini PML}}{\text{Bandara/Pelabuhan di KKP Kelas I Makassar}} \times 100$$

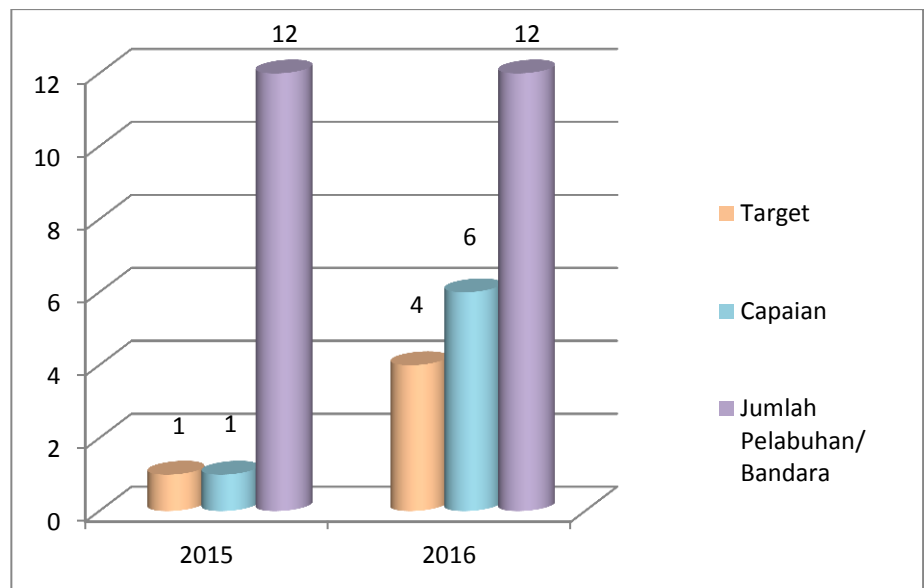
b) Capaian Kinerja

(1) Capaian Kinerja

$$\frac{6}{12} \times 100 = 50\%$$

Dari total 12 lokasi pelabuhan/bandara, terdapat 6 lokasi yang telah melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung (PML), yaitu penyakit HIV/AIDS dan atau TB paru. Adapun ke 6 lokasi tersebut adalah di Pelabuhan Laut Makassar, kantor induk KKP Makassar, wilayah kerja pelabuhan Parepare, wilayah kerja pelabuhan Bajoe, wilayah kerja pelabuhan Palopo dan wilayah kerja pelabuhan Tampa Padang. Capaian kinerja indikator deteksi dini penyakit menular langsung (PML) KKP Kelas I Makassar pada tahun 2016 telah melampaui target, yaitu mencapai 50% dari target sebesar 30%.

(2) Trend Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu 2015 – 2016



Grafik III.5 Grafik Capaian Jumlah Pelabuhan/Bandara Yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Penyakit Menular Langsung Pada Tahun 2015 - 2016

Grafik III.5 menunjukkan dari total 12 lokasi pelabuhan/bandara, terdapat 6 lokasi yang telah melaksanakan kegiatan deteksi dini PML. Capaian jumlah pelabuhan atau bandara yang melaksanakan deteksi dini PML telah melampaui target, yaitu mencapai 50% dari target sebesar 30%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Kegiatan deteksi dini PML direncanakan di pelabuhan/bandara, yaitu satu lokasi untuk VCT mobile HIV/AIDS dan lima lokasi untuk deteksi dini TB. Sepanjang tahun 2016, kegiatan deteksi dini HIV/AIDS telah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu di pelabuhan laut Makassar, wilayah kerja pelabuhan Parepare dan kantor induk KKP Kelas I Makassar. Sementara itu, kegiatan deteksi dini TB telah dilaksanakan di lima lokasi sesuai perencanaan, yaitu di pelabuhan laut Makassar, pelabuhan Parepare, pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo dan Bandara Tampa Padang.

Kegiatan deteksi dini PML di wilayah pelabuhan/bandara telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kegiatan deteksi dini HIV/AIDS pada tahun 2015 memberdayakan pelaut yang melakukan pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU). Sementara pada tahun 2016, telah tersedia anggaran kegiatan deteksi dini PML. Untuk kegiatan deteksi dini HIV/AIDS, tersedia dana sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan terealisasi sebesar 94,25%. Sementara untuk deteksi dini penyakit TB, terealisasi sebesar 75% dari anggaran Rp. 44.285.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan deteksi dini PML sebesar Rp.70.385.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 57.939.300,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 82,32%.

5. INDIKATOR KELIMA

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular (PTM)

Target persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM pada tahun 2016 adalah sebesar 50%.

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase pelabuhan/bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM.

(2) Definisi Operasional

Pelabuhan/bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular kepada pemberi dan pengguna jasa pelabuhan/bandara, dengan melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM, serta konsultasi dokter.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Pelabuhan atau Bandara yang melaksanakan skrining PTM}}{\text{Bandara atau Pelabuhan di KKP Kelas I Makassar}} \times 100$$

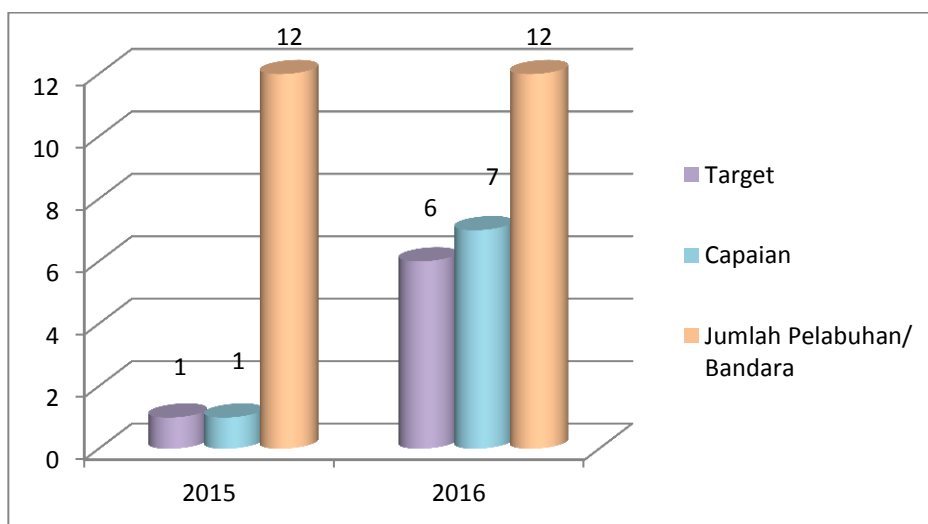
b) Capaian Kinerja

(1) Capaian Kinerja

$$\frac{7}{12} \times 100 = 58,33\%$$

Dari total 12 lokasi pelabuhan/bandara, terdapat tujuh lokasi yang telah melaksanakan kegiatan skrining PTM. Lokasi tersebut adalah pelabuhan laut Makassar, pelabuhan Paotere, Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Parepare, pelabuhan Bajoe, pelabuhan Palopo dan pelabuhan Mamuju.

b) Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu 2015 – 2016



Grafik III.6 Capaian Jumlah Pelabuhan/Bandara Yang Melaksanakan Kegiatan Skrining Penyakit Tidak Menular Pada Tahun 2015 - 2016

Grafik III.6 menunjukkan dari total 12 lokasi pelabuhan/bandara, terdapat 7 lokasi yang telah melaksanakan kegiatan skrining PTM. Capaian jumlah pelabuhan/bandara yang melaksanakan skrining PTM telah melampaui target, yaitu mencapai 58,33% dari target sebesar 50%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan inisiatif dari petugas dan kerjasama dengan Puskesmas di wilayah buffer.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2015, monitoring deteksi dini PTM dilakukan melalui posbindu PTM di pos pelabuhan rakyat Paotere tanpa menggunakan anggaran DIPA karena tidak dianggarkan. Sementara pada tahun 2016, telah tersedia anggaran skrining PTM sebesar Rp. 55.150.000 (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 51.331.000 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 93,07%. .

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan skrining PTM yaitu sebesar Rp 55.150. (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan capaian Rp 51.331.000 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 93,07%.

6. INDIKATOR KEENAM

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Target Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu :

a. Persentase sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat sanitasi

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase SAB yang diperiksa dan memenuhi syarat sanitasi

(2) Definisi Operasional

Kondisi SAB memenuhi syarat berdasarkan frekuensi pemeriksaan yang berada dalam pengawasan dan pembinaan KKP Kelas I Makassar yang digunakan untuk suplay air di alat angkut dan terminal penumpang.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah SAB memenuhi syarat}}{\text{Jumlah SAB diperiksa}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{347}{377} \times 100 = 92,04\%$$

Jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2016 sebanyak 347 dari 377 sarana (92,04%). Dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 213 dari 229 sarana (93,01%) capaian target ini menurun dari pencapaian tahun sebelumnya.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Kegiatan inspeksi sanitasi sarana air bersih dilakukan secara rutin dengan metode observasional menggunakan instrumen kuesioner inspeksi SAB yang dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditentukan. Berdasarkan jumlah SAB yang diperiksa, yang tidak memenuhi syarat meningkat secara signifikan pada Januari 2016 di wilayah Pelabuhan Makassar. Hal ini disebabkan karena adanya genangan air di sekitar hydrant akibat hujan di awal tahun yang memungkinkan terjadinya kontaminasi. Rekomendasi diberikan kepada pihak terkait.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan lebih efisien karena dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan lainnya untuk menghemat penggunaan anggaran

2) Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana air bersih sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) atau 100%.

b. Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase sampel air minum/ air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat

(2) Definisi Operasional

Kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dengan parameter fisik, kimia dan atau bakteriologis

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah sampel AM/AB memenuhi syarat}}{\text{Jumlah AM/AB diperiksa}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{260}{297} \times 100 = 87,54\%$$

Persentase jumlah sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat pada tahun 2016 sebesar 87,54% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (82,66%). Persentase capaian tahun ini telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 80%

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Pengambilan sampel air minum/ air bersih dilakukan di beberapa titik termasuk gedung perkantoran, industri pengolahan makanan dan tempat penyedia makanan. Hasil pemeriksaan hanya berlaku pada sampel yang telah diuji. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang dengan adanya pengawasan secara rutin terhadap sarana termasuk pipa penyaluran dan reservoir sebagai wadah penampungan air persediaan. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan bersifat sementara karena laboratorium KKP belum terakreditasi.

Usul pemecahan masalah yaitu dengan merujuk sampel ke laboratorium terakreditasi dan mengupayakan akreditasi laboratorium di KKP.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

(1) Pembelian bahan pemeriksaan air di laboratorium pendukung sanitasi lebih dioptimalkan

(2) Sampel rujukan diminimalisir

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengendalian binatang penular penyakit sebanyak Rp. 38.840.000,- (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 37.443.500,- (*Tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) atau 96,40%

7. INDIKATOR KETUJUH

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

Target persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 adalah sebesar 80%.

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

PropoPersentaarsi tempat – tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

(2) Definisi Operasional

Kondisi TTU yang memenuhi syarat di wilayah pelabuhan/ bandara sesuai standar yang diukur pada saat pemeriksaan.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah TTU memenuhi syarat}}{\text{Jumlah TTU diperiksa}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{45}{45} \times 100 = 100\%$$

Persentase cakupan tempat – tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 sebesar 100%. Dibandingkan pada tahun 2015 (93,33%) capaian indikator ini mengalami peningkatan.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan inspeksi sanitasi tempat – tempat umum dilaksanakan secara rutin dalam tiap bulannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebersihan tempat–tempat umum yang ada di wilayah kerja. Pemberian saran secara langsung berdasarkan hasil pemeriksaan membantu dalam pelaksanaan tindak lanjut secara cepat dan tepat. Namun, pada pelaksanaan kegiatan frekuensi pemeriksaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

- (1) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan
- (2) Kegiatan dilaksanakan diupayakan bersamaan dengan kegiatan yang lainnya untuk meminimalisir penggunaan anggaran
- (3) SDM masih terbatas sehingga satu petugas melaksanakan pekerjaan rangkap

2) Realisasi Anggaran

Realiasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengawasan tempat – tempat umum sebanyak Rp. 1.000.000,-(*Satu juta rupiah*).

8. INDIKATOR KEDELAPAN

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Target persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 adalah sebesar 50%. Untuk mencapai indikator tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

a. Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase TPM yang diperiksa memenuhi syarat sanitasi serta memiliki sertifikat laik sehat

(2) Definisi Operasional

Kondisi TPM yang memenuhi syarat dan memiliki sertifikat laik sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan hygiene sanitasi TPM. Dalam pengukuran ini dihitung berdasarkan frekuensi pemeriksaan.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah TPM memenuhi syarat dan memiliki sertifikat laik sehat}}{\text{Jumlah TPM diperiksa}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{193}{425} \times 100 = 45,41\%$$

Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2016 sebesar 45,41%, pencapaian ini belum mencapai dari target yang ditentukan yakni sebesar 50%. Persentase pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 90,8 %.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Inspeksi TPM dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan dengan metode observasi. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang telah ditentukan. Setiap pengelola TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM utamanya sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam. Pemahaman pengusaha makanan tentang pentingnya memiliki sertifikat laik sehat perlu ditingkatkan. Beberapa pengusaha keberatan untuk membayar biaya penerbitan sertifikat sehingga menjadi kendala bagi petugas untuk menerbitkan sertifikat bagi TPM yang memenuhi syarat.

Usulan pemecahan masalah adalah melakukan peningkatan pengetahuan mengenai hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan maupun pengelola TPM melalui sosialisasi/ penyuluhan ataupun kursus penjamah makanan.

d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

(1) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan dan kelengkapan pemeriksaan TPM

(2) Petugas sanitasi di wilker masih kurang sehingga sebagian besar wilker belum melaksanakan pengawasan terhadap TPM yang ada

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan TPM sebanyak Rp. 2.710.000,- (*Dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.804.000,- (*Satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*) atau 66,57%

9. INDIKATOR KESEMBILAN

Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

Target persentase Pelabuhan/Bandara sehat tahun 2016 adalah sebesar 40%.

Untuk mencapai indikator tersebut dilakuakn kegiatan, sebagai berikut:

a. Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan sehat

(2) Definisi Operasional

Terlaksananya program pelabuhan sehat di pelabuhan/bandara yang sudah membentuk forum pelabuhan sehat.

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah wilker yg melaksanakan program pel.sehat}}{\text{Jumlah wilker terbentuk forum}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{4}{8} \times 100 = 50\%$$

Forum Pelabuhan Sehat telah dibentuk di 8 (delapan) lokasi yang merupakan wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Namun, program pelabuhan sehat belum aktif dilaksanakan di setiap wilayah kerja. Hingga tahun 2016, hanya 4 (empat) lokasi yang melaksanakan program pelabuhan sehat, yaitu Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Parepare, Bandar Udara Internasional Hasanuddin dan Pelabuhan Palopo. Persentase yang dicapai pada tahun 2016 sebesar 50%, pencapaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar 62,50%. Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 125% Target persentase Pelabuhan/Bandara sehat tahun 2016 adalah sebesar 40%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Program forum pelabuhan sehat KKP Kelas I Makassar mulai diwacanakan pada tahun 2011 sehingga pelaksanaan forum dimulai pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa instansi terkait melalui kerja sama lintas sektor maupun lintas program. Beberapa masalah ditemukan selama program ini dijalankan diantaranya adalah

- (1) Pelaksanaan program pelabuhan sehat belum berjalan secara maksimal karena masih didominasi oleh kegiatan KKP Kelas I Makassar.
- (2) Partisipasi lintas sektor belum optimal, belum memahami fungsinya masing – masing dalam mewujudkan pelabuhan yang sehat

Usulan pemecahan masalah adalah

- (1) Advokasi dan sosialisasi terus dilakukan serta melakukan rapat kerja di awal tahun untuk merencanakan kegiatan forum tahun berjalan atau tahun berikutnya dengan mendayagunakan seluruh anggota forum.
- (2) Peningkatan kerjasama lintas sector terkait untuk mengaktifkan kembali forum yang telah dibentuk.

d) Analisis efisiensi sumber daya

- (1) Kekurangan sumber daya untuk pengelolaan pelabuhan sehat di wilker
- (2) Sebagian petugas wilker belum aktif melaksanakan program ini.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pelabuhan sehat sebanyak Rp. 57.183.000,- (*Lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 53.515.775,- (*Lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau 93,59%

10. INDIKATOR KESEPULUH

Hasil Penilaian SAKIP adalah AA

Target hasil penilaian SAKIP tahun 2016 adalah AA.

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar pada tahun sebelumnya (tahun 2015) mendapat nilai AA

(2) Definisi Operasional

Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2015 yang dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 mendapat nilai AA

(3) Rumus

$$\frac{\text{Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar}}{\text{Target penilaian SAKIP}} \times 100$$

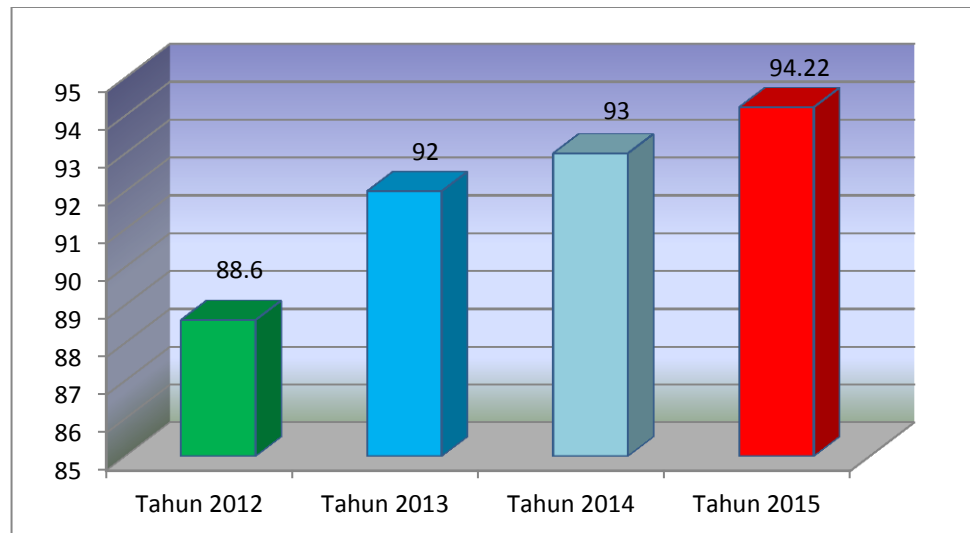
b) Capaian Kinerja

$$\frac{94,22 (AA)}{AA} \times 100 = 100\%$$

Hasil penilaian evaluasi SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2015 yang dilaksanakan pada bulan April 2016 mendapat nilai 94,22 (AA) sehingga persentase capaian indikator tersebut adalah sebesar 100%. Dibandingkan tahun 2014, nilai SAKIP Kelas I adalah 93 yang berarti terdapat kenaikan hasil penilaian.

Nilai hasil akhir dari evaluasi SAKIP terdiri dari tujuh kategori yaitu :

- (1) Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (sangat memuaskan) dengan skor >90 – 100
- (2) Nilai A (memuaskan) skornya >80-90
- (3) Nilai BB (sangat baik) dengan skor >70-80
- (4) Nilain B (baik) dengan skor >60-70
- (5) Nilai CC (cukup) dengan skor >50-60
- (6) Nilai C (kurang) dengan skor >30-50
- (7) Nilai D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30



Grafik III.7 Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2012 s.d 2015

- c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan
 - a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan evaluasi serta dokumen pelaporan sebelum waktu pelaksanaan evaluasi SAKIP.
 - 2) Menyusun dokumen LAKIP berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan yang ditetapkan.
 - b) Masalah yang dihadapi

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyusunan LAKIP dan evaluasi SAKIP
 - c) Usul pemecahan masalah

Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan LAKIP dan evaluasi SAKIP dengan mengikuti bimbingan teknis oleh Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P yang bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian kesehatan RI
 - d) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dibandingkan dengan tahun 2015, hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar mengalami peningkatan, hal ini juga diikuti dengan peningkatan anggaran yang disiapkan. Pertemuan evaluasi program/rencana kerja/penetapan kinerja pada tahun 2015 hanya dianggarkan untuk ATK dan konsumsi pertemuan lokal sebanyak 50 orang untuk dua kali pertemuan sedangkan pada tahun 2016 pertemuan mengikutsertakan petugas dari wilker. Melihat hasil penilaian SAKIP yang meningkat, anggaran yang disiapkan telah efektif dalam penggunaannya.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia pada tahun 2015 untuk pertemuan evaluasi SAKIP ke Pusat dan Pertemuan penetapan kinerja sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 18.374.200 (Delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 95,7%

Anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 112.740.000 yang terdiri dari Penyusunan Lakip dan perjanjian kinerja termasuk biaya cetak dokumen Lakip (Rp. 96.740.000,-) dan biaya mengikuti pertemuan

evaluasi SAKIP untuk 2 orang (Rp. 16.000.000,-) . Realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 112.740.000 atau 100%.

11. INDIKATOR KESEBELAS

Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

Target persentase wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya pada tahun 2016 adalah sebesar 50%.

a. Persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase kepemilikan gedung di Wilker KKP Kelas I Makassar

(2) Definisi Operasional

Jumlah Wilker (termasuk kantor induk) KKP Kelas I Makassar yang memiliki gedung milik Kemenkes sampai dengan tahun 2016

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes}}{\text{Jumlah target Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{5}{11} \times 100 = 45\%$$

(1) Target Tahun Sebelumnya

Target persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes tahun 2015 adalah 30%. Jumlah Wilker saat ini yang telah memiliki gedung milik Kemenkes sebanyak tiga Wilker yaitu gedung di Pelabuhan Laut Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin dan di Parepare. Persentase capaian target adalah 100%

(2) Target Tahun 2016

Target persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes tahun 2016 adalah 45%. Jumlah Wilker yang telah memiliki gedung milik Kemenkes sebanyak tiga Wilker, ditambah pembangunan gedung baru di tahun 2016 yakni di Wilker Pelabuhan Laut Bajoe dan Pelabuhan Laut Palopo sehingga jumlah Wilker yang telah memiliki gedung adalah sebanyak lima dari sebelas Wilker KKP Kelas I Makassar (45%). Target tahun 2016 telah tercapai yakni 100%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

(1) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

Menyediakan anggaran untuk pembangunan gedung pada DIPA KKP Kelas I Makassar

(2) Masalah yang dihadapi

Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan untuk pembebasan lahan pada dua wilayah kerja yaitu Wilker Pelabuhan Malili dan Pos Pelabuhan Bulukumba tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kegiatan pembangunan gedung wilker untuk tahun 2017 karena tidak ada lokasi tanah yang siap untuk dibangun.

(3) Usul pemecahan masalah

Mengusulkan anggaran pembangunan gedung untuk Wilker yang belum memiliki gedung kantor milik Kemenkes

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk pembangunan gedung di dua wilayah kerja yaitu Wilker pelabuhan Palopo dan Wilker Pelabuhan Bajoe sebesar Rp. 2.138.895.000 (*dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Komponen biaya ini terdiri atas konstruksi fisik bangunan, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.134.548.300,- atau 99,8%

b. Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus

1) Capaian Kinerja Organisasi

a) Pengertian Umum

(1) Pengertian

Persentase Wilker/Pos KKP Kelas I Makassar yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus

(2) Definisi Operasional

Jumlah wilker/pos KKP Kelas I Makassar yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus

(3) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Wilker/pos yang memiliki kendaraan}}{\text{Jumlah Wilker/Pos}} \times 100$$

b) Capaian Kinerja

$$\frac{6}{11} \times 100 = 55\%$$

Target persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus tahun 2016 adalah 55%. Jumlah wilker/pos yang telah memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus sebanyak enam dari sebelas Wilker/Pos (55%) yakni Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo dan Bandara Tampapadang. Capaian target telah terpenuhi 100%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

(1) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

Mengakomodir Wilker yang belum memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus untuk peningkatan pelayanan di Wilker KKP Kelas I Makassar. Menyiapkan bahan perencanaan secara cermat untuk pengajuan pengadaan kendaraan dengan menyiapkan data dukung dan TOR yang lengkap

(2) Masalah yang dihadapi

(a) Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan pembatasan pengadaan kendaraan operasional/fungsional.

(b) Masih ada kendaraan tidak layak pakai yang belum dihapus

(3) Usul pemecahan masalah

Mengusulkan penghapusan kendaraan yang tidak layak pakai, sehingga dapat mengusulkan pengadaan kendaraan yang baru.

2) Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016 dianggarkan pengadaan kendaraan khusus beserta perlengkapannya (kendaraan khusus Boarding, kendaraan khusus kesehatan matra dan ambulans khusus penyakit menular) senilai Rp. 1.312.850.000,- (*satu milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi 100%, dan pengadaan mobil ambulance senilai Rp. 829.350.000,- (*delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi 100%.

B. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) orang ditambah tenaga pramubakti (satpam dan sopir) 14 (empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut.

a. Menurut Jabatan:

- Jabatan Struktural = 13 orang
- Staf/Jabatan Fungsional
 - Jabatan Fungsional Tertentu = 23 orang
 - Jabatan Fungsional Umum = 89 orang
- Satpam dan Sopir = 14 orang; terdiri dari :
 - Pengamanan Kantor (Satpam) = 7 orang

- Pengemudi (Sopir) = 7 orang

b. Menurut Golongan:

- Golongan II = 31 orang
- Golongan III = 81 orang
- Golongan IV = 13 orang

c. Menurut Pendidikan:

- SD = - orang
- SLTP = - orang
- SLTA = 5 orang
- D3 = 42 orang, terdiri dari:
 - D3 Kesehatan = 39 orang
 - D3 Ekonomi Akuntansi = 2 orang
 - D3 Komputer = 1 orang
- D4 = 1 orang
- S1 = 44 orang
- S2 = 33 orang

Dilihat dari jenis dan tingkat pendidikan, SDM di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Kelas I Makassar dapat diuraikan sebagai berikut:

- S2 sebanyak 26,4%
- S1 sebanyak 35,2%
- D4 MIPA sebanyak 0,8%, hanya 1 orang.
- D3 sebanyak 33,6% dengan D3 Kesehatan sebanyak 92,9% dan D3 dari Non Kesehatan sebanyak 7,1% yakni D3 Ekonomi Akuntansi dan D3 Komputer.
- SLTA sebanyak 5 orang atau 4,0%

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Dengan proporsi SDM yang ada, telah cukup memadai namun masih perlu peningkatan kualitas terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk itu selain melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui

pelatihan-pelatihan teknis dan diskusi-diskusi teknis baik melalui pertemuan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media social yang sedang berkembang sangat cepat saat ini.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran. Besarnya alokasi anggaran awal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 29.662.226.000,- (Dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2016 anggaran KKP Kelas I Makassar diefisiensi (efisiensi tahap I) dengan memotong anggaran sebesar 6,7% yakni sebesar Rp. 1.974.224.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga dari pagu awal Rp. 29.662.226.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp. 27.688.002.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah). Efisiensi tahap II pada bulan Oktober 2016, tidak ada pemotongan nilai pagu namun dilakukan *Self Blocking* sebesar Rp.5.716.690.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga anggaran yang dapat digunakan hanya sebesar Rp. 21.971.312.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). *Self blocking* dilakukan pada dana anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Anggaran bersumber RM sebesar Rp. 22.586.817.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan blokir Rp. 5.716.690.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), bersumber PNBPNP sebesar Rp. 5.101.185.000,-.

Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya :

Tabel III.2 Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2016

NO	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	Sarana Prasarana Surveilans Dan Karantina Kesehatan *	1,493,150,000
2	SDM Surveilans Dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkatkan Kualitasnya *	625,706,000
3	Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik *	74,800,000
4	SDM Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkatkan Kualitasnya	212,618,000
5	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat *	451,959,000
NO	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
6	SDM Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkatkan Kualitasnya	73,239,000
7	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat	548,858,000
8	SDM Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkatkan Kualitasnya *	138,743,000
9	Sarana Prasarana Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *	6,503,111,000
10	SDM Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkatkan Kualitasnya *	205,390,000
11	Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD) *	2,234,050,000
12	Layanan Perkantoran *	10,868,241,000

Keterangan :

*) terdapat dana yang diblokir

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja.

Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja. Jenis dan jumlah sarana/prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai 31 Desember 2016 adalah :

Tabel III.3 Laporan BMN Tahun Anggaran 2016

No.	Jenis BMN	Satuan	Saldo Per 31 Desember 2016	
			Kuantitas	Nilai
1.	Tanah			
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	m2	321	305,700,000
	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	m2	9,926	9,784,460,300
2.	Peralatan dan Mesin			
	Station Wagon	Unit	1	340,720,455
	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	Unit	1	423,881,600
	Sepeda Motor	Unit	16	273,798,000
	Mobil Ambulance	Unit	9	3,232,409,250
	Kendaraan Klinik	Unit	1	473,742,500
	Kendaraan Taktis	Unit	7	1,942,395,000
	Speed Boat/Motor Tempel	Unit	1	27,060,000
3.	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	4	13,416,324,300
	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	18,600,000
4.	Jaringan			
	Bangunan Penampung Sampah Lainnya	Unit	1	94,316,000
	Jaringan Listrik Lainnya	Unit	1	33,500,000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sumber daya sarana/prasarana dan pelaksanaan kebijakan dan program KKP Kelas I Makassar. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, peranan LAKIP ini bagi KKP kelas I Makassar juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP ini dibuat untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar di tahun 2016, juga dapat menjadi acuan untuk menentukan target dan kebijakan di tahun 2017 dan penyusunan perencanaan di tahun berikutnya.

LAKIP ini dibuat juga sebagai bahan evaluasi kinerja, dan diharapkan semakin hari semakin baik dan terjadi peningkatan, karena itu pula KKP Kelas I Makassar terus melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan perubahan Pejabat struktural yang ada dalam struktur organisasi KKP Kelas I Makassar diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Dalam perspektif lebih luas, manfaat LAKIP ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik untuk menilai kinerja KKP Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2016.

Semoga laporan ini dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan pemerintah Indonesia yang bersih (*good governance*) bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya di internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 diharapkan dapat lebih ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Segala permasalahan serta solusi yang dituangkan dalam Lakip ini diharapkan tidak sekedar menjadi sebuah kalimat di atas kertas tanpa realisasi kearah yang lebih baik dan menjadi catatan perbaikan di tahun berikutnya.

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas I Makassar tahun anggaran 2016

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas I Makassar, tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2015

Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar tahun 2016

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2011 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019, KKP Kelas I Makassar Tahun 2016

PENYUSUN

- Penanggung Jawab : dr. Darmawali Handoko, M. Epid
- Kontributor : Nirwan SKM, M. Kes
Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
H. Anas Sibadu, SKM, M.Kes
dr. Bambang Budiman
Sarli, S.Sos, M.Si
Hj. Sukarni, SKM, M.Kes
Nurdin, SKM
Masnar, AMd.KL, SE
Markus Minggu, SKM, M.Kes
Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes
dr. Hj. Juniarty Naim
- Koordinator Pelaksana : Yusrianto, SKM
- Ketua : Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
- Sekretaris : Arfiani, SKM
- Anggota : 1. Kaimuddin, AMd.KL
2. Nurhayati HL, SKM
3. Nur Said Rais, AMd.KL
4. Ismainar, AMK
5. Fathul Jannah, AMd.Kep
6. dr. H. Abbas Zavey Nurdin, Sp.OK, MKK
7. Abd. Rahman S., AMd.KL
8. Hj. Satriani, SKM
9. Hj. Nur Magfirah, SKM, M. Kes
10. Turbowo, SKM, M.Kes
11. Feirus Rizki Andayani, SKM, MH
12. Arwin Amin, AMd.Kom
13. Amriana Amin, AMd.Ak
14. Nining Ayu Purnama, S.Kom